



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke 2 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT KALPIKA WANATAMA UNIT I		
Alamat Kantor : Desa Falabisahaya, Kelurahan Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.		
Lokasi Hutan : Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Tanaman		
Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	11.780	
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	11.780	- Hutan Tanaman : 6.200 ha - Hutan Sekunder : 4.204 ha - Area Konservasi : 1.327 ha - Infrastruktur : 49 ha
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	-	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	11.780	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	-	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 18 November 2025



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 November 2025

No. : 029.3/SKEP-MUTU/XI/2025
Lamp. : 1
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-2 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.

Direktur PT Kalpika Wanatama Unit I

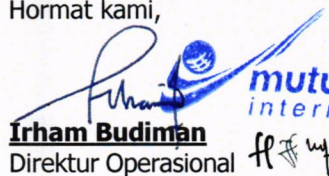
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-2 sertifikasi SFM IFCC pada PT Kalpika Wanatama Unit I sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	SFM-IFCC-MUTU-003
Masa Berlaku Sertifikat	:	10 November s.d. 09 November 2026
Ruang Lingkup	:	Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	:	11.780 Ha
Lokasi	:	Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Tanggal Penilaian	:	11 s.d. 19 Oktober 2025
Tim Audit	:	• Ence Hedi Hasan Z., S.Hut. (Lead Auditor, Bidang Produksi) • Aep Sukendar, S.Hut. (Auditor, Bidang Ekologi) • Ir. Falahudin (Auditor, Bidang Sosial)
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	2
d. Observasi	:	7
Status Sertifikat	:	Sertifikat yang Ada Terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Re-Sertifikasi , selambat-lambatnya dilaksanakan pada September 2026.

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional



MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

SUMMARY REPORT OF SURVEILLANCE 2
PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT - IFCC
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

(1) **LSSM-IFCC/PEFC Identity/Identitas LSSM-IFCC/PEFC**

- a. *Name of Institution/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. *Accreditation Number/Nomor Akreditasi* : LSSM-008-IDN, 2 Januari 2025
c. *Address/Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
d. *Phone Number/Fax Number/E-mail/
Nomor Telepon/Faks/E-mail* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
e. *President Director/Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. *Standard/Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
g. *Audit Team/Tim Audit* : 1. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim/ Aspek Produksi)
2. Aep Sukendar (Anggota/Aspek Ekologi)
3. Falahudin (Anggota/Aspek Sosial)
h. *Audit Date/Tanggal Audit* : 11 – 19 Oktober 2025
i. *Decision Maker/Tim Pengambil Keputusan* : 1. Taufik Margani
2. Miftah Farid

(2) **Auditee Identity
/Identitas Auditee**

- a. *Management Unit Name/
Nama Unit Manajemen* : PT Kalpika Wanatama Unit I
b. *Legality of Management Unit/
Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, tanggal 31 Desember
2021, Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024.
c. *Area and Location/
Luas dan Lokasi* : 11.780 Ha
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara
d. *Management Unit Address/
Alamat Unit Manajemen* : Desa Falabisahaya, Kel Falabisahaya, Kec Mangoli Utara, Kab Kepulauan
Sula
e. *Phone Number/Fax Number/E-mail/
Nomor Telepon/Faks/E-mail* : <https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1>
f. *Administrator/Pengurus* : Edward Tombakan
g. *Location of the Area/Letak Areal* : Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

(3) Stage Summary/Ringkasan Tahapan

Stages/Tahapan	Time and Place / Waktu dan Tempat	Summary Notes/Ringkasan Catatan
Opening Meeting / Pertemuan Pembukaan	October 12, 2025, 12 Oktober 2025 PT Kalpika Wanatama Unit I	The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes: • Introduction of Audit Team Members • The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used • Audit standards and guidelines used Audit implementation methodology • Status and definition of the type of non-conformity record / CARs (Major, Minor) and Observations • Appointment of Personnel In Charge (PIC) of Auditee for each auditor Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Document Verification and Field Observation / Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	October 13-16, 2025 13-16 Oktober 2025 PT Kalpika Wanatama Unit I	• The audit team has collected, studied the auditee's data and documents, and analyzed them using the clauses and requirements set out in this standard. • Field observations have been carried out by the Audit Team to test the accuracy of the data through observation, recording, random testing, interviews and analysis using the clauses and requirements stipulated in this standard. • Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. • Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Closing Meeting/ Pertemuan Penutupan	October 17, 2025 17 Oktober 2025 PT Kalpika Wanatama Unit I	The closing meeting activities have been carried out, the material presented includes: • Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out • Submission of interim assessment results and confirmation of audit results and findings • Explanation of the next certification stages

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

Stages/Tahapan	Time and Place / Waktu dan Tempat	Summary Notes/Ringkasan Catatan
		<i>Signing of the Minutes of the Closing Meeting.</i> Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Decision-making / Pengambilan Keputusan	November 18, 2025 18 November 2025	<i>PT Kalpika Wanatama Unit I was determined to meet the IFCC ST 1001:2021 Standard, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements.</i> PT Kalpika Wanatama Unit I diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Previous Audit Corrective Action Progress (filled in by the auditor)
Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

The results of the 1st surveillance assessment in 2024 showed that PT Kalpika Wanatama Unit I had met the requirements in accordance with the IFCC ST 1001:2021 SFM standard, there were 18 findings consisting of: 9 minor category findings and 9 observation categories.

These findings have been verified against evidence of fulfillment, both documents and/or implementation in the field, all findings have been declared CLOSED.

Hasil pelaksanaan penilaian penilikan ke-1 tahun 2024, menunjukkan bahwa PT Kalpika Wanatama Unit I telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, terdapat 18 temuan yang terdiri: 9 temuan kategori minor dan 9 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, seluruh temuan telah dinyatakan CLOSED.

(5) SFM Performance Assessment Results Summary (filled in by the auditor)
Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

A stakeholder consultation was conducted via email on September 2, 2025, to gather information related to forest management operations using the MUTU-4200N.FM form, which would then be considered and evaluated during the audit process. The form also allowed stakeholders to confirm their desire to meet and speak directly with the auditor. However, no comments were received by the time the audit was completed.

Telah dilakukan konsultasi para pihak melalui email pada tanggal 2 September 2025 untuk menghimpun informasi terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM, untuk kemudian dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak.

The absorption of information from the parties and the public was also obtained through information searches in the mass media related to the operations of PT Kalpika Wanatama I during the verification period. The Indonesian Times media on June 26, 2025 reported "Incomplete Documents, PT Kalpika Wanatama Unit I Continues to Load Wood in Samuya Taliabu". Furthermore, it was reported "Acting (Pj) Head of Samuya Village, Muharram Fataruba told this media, PT Kalpika Wanatama Unit I continued to load which was known to have taken place on Thursday (June 26, 2025).

Penyerapan informasi para pihak dan publik juga diperoleh melalui pencarian informasi di media massa terkait operasional PT Kalpika Wanatama I periode verifikasi. Media Times Indonesia pada tanggal 26 Juni 2025 memberitakan "Tidak Lengkapi Dokumen, PT Kalpika Wanatama Unit I Tetap Lakukan Pemuatan Kayu di Samuya Taliabu". Selanjutnya diberitakan "Penjabat (Pj) Kepala Desa Samuya, Muharram Fataruba kepada media ini katakan, PT Kalpika Wanatama Unit I tetap melakukan pemuatan yang diketahui dilaksanakan pada Kamis (26 Juni 2025).

Consultation with the parties was also carried out during the audit by holding meetings with community representatives in 2 (two) villages, namely: Samuya Village and Waikoka Village on October 14, 2025. From consultations with village officials and community leaders in the two villages, information was obtained that the community strongly supports the operations of PT. Kalpika Wanatama I. This full support is due to the benefits felt by the community, namely the opening of broad employment opportunities for the community, the existence of CSR programs, and productive economic empowerment programs.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat di 2 (dua) desa, yaitu: Desa Samuya dan Desa Waikoka pada tanggal 14 Oktober 2025. Dari konsultasi pada aparat desa dan tokoh masyarakat di dua desa tersebut diperoleh informasi bahwa masyarakat sangat mendukung operasional PT. Kalpika Wanatama I. Adanya dukungan penuh ini dikarenakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, adanya program CSR, dan program pemberdayaan ekonomi produktif.

Assessment Results / Hasil Penilaian

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
1	4. Leadership / Kepemimpinan	- PT Kalpika Wanatama Unit I has established the Company's Vision and Mission, which was signed by the President Director on July 23, 2025. The Vision and Mission reflect the management's objectives regarding sustainable forest management. - PT Kalpika Wanatama Unit I has provided the company's Vision, Mission and Commitment available to the public which can be accessed well, and has included compliance with this standard and continuously improving the sustainable forest management system, on the website: https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/ - The company has established an organizational structure for industrial forest plantation management activities, which was ratified through the Decree of the President Director Number 323/Skep/X/2025 dated October 13, 2025. - PT Kalpika Wanatama Unit I telah menetapkan Visi Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 23 Juli 2025. Visi dan Misi tersebut telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari - PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyediakan Visi Misi dan Komitmen perusahaan yang tersedia untuk Publik yang dapat diakses dengan baik, dan telah mencakup kepatuhan terhadap standar ini dan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari, pada website: https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/ - Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 323/Skep/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025
2	5. Planning / Perencanaan	- The company has risk and opportunity management related to compliance with the requirements for sustainable forest management by identifying social impacts arising from forest management activities, which has been equipped with a risk and opportunity table containing issues related to Sustainable Forest Management, descriptions, risks/opportunities, actions to address risks/opportunities and control targets. - Based on audit evidence, analysis and audit criteria, it can be concluded that PT KW 1 has established a comprehensive and periodic inventory and mapping system for forest

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		resources which includes: Timber forest resources from plantation forests; ecologically important forest areas; and social and cultural functions. ○ The company has established an adequate management plan that includes forest resource management in accordance with applicable laws and regulations which include Production Management, Environmental Management and Social Management, namely the RKUPH for the 2018-2027 period which was approved based on Decree Number SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL. 1/10/2022 dated October 27, 2022 and the annual work plan (RKTPH). ○ In preparing the management plan document (Amendment of the RKUPH Period 2018-2027), the conditions of use and function of forest areas have been considered, namely referring to the Map of Development of the Confirmation of Forest Areas of North Maluku Province (attachment to the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.6601/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dated October 27, 2021), where in the PBPH area of PT Kalpika Wanatama Unit I there are functions of HPT (2,404 ha), HP (9,293 ha) and HPK (83 ha) areas. And then outlined in the work area arrangement plan (spatial planning) consisting of protected areas and cultivation areas, and has been updated periodically based on monitoring and evaluation. ○ The company has prepared a management plan (Amendment to the RKUPH for the 2018-2027 Period) which generally includes; current management units, long-term management objectives and the average annual felling allowance, including the sustainable harvesting level. ○ Based on the PBPH Decree and the Changes to the Forest Utilization Business Work Plan (RKUPH) document for the 2018-2027 Period which have been approved by the Ministry of Environment and Forestry, the type of business activity or scope of forest utilization carried out by the company is the utilization of timber products from plantation forests, there is no plan for the utilization of HHBK by the company which includes commercial utilization. ○ The company has determined ways and means to minimize the risk of degradation and damage to forest ecosystems in forest management operations, including by minimizing infrastructure development, land preparation without burning, and marking the boundaries of logging areas. ○ The company has considered research and development in the forest management plan, including the results of scientific research on plantation forest management, namely regarding the growth of Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) seedlings in top soil media with the provision of NPK fertilizer and compost. Relevant R&D results are adopted in the work procedure and instruction documents (SOP and WI) as guidelines in implementing operational activities in the field. ○ The company has shown the 2025 Plantation Forest Management Plan Summary document which is available and can be accessed by the public on the website https://sgmaluku.co.id ○ The company has identified regulations, has access to regulations, determined how regulations apply to the company in all areas of work, and has complied with the timber legality verification system as per applicable regulations. ○ In general, the company has complied with local, national and ratified international laws and regulations relating to forest management. ○ The company has implemented mechanisms or procedures to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment and other non-procedural activities, namely the Forest Protection and Security Procedure, SOP Number: FP-PK-004, Revision 02 dated September 4, 2023. ○ Based on the 2021 Social Impact Assessment Report of PT Kalpika Wanatama Unit I and the 2021 High Conservation Value Identification Report, it was found that there was no land ownership or control by customary and traditional communities. ○ The company has ensured that customary and traditional laws and ownership rights over tree ownership and land use are not violated by implementing free, prior, and informed

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		consent (FPIC) from rights holders, including making agreements/cooperation agreements on the management of life plants and providing mutually agreed benefits of life plants. ○ The Company has endeavored to respect the rights of indigenous/local communities in forest management practices and activities in accordance with national laws and ratified international regulations. ○ The Company has committed to the Implementation of the ILO Core Conventions, dated July 23, 2025 and has endeavored to fulfill workers' rights as stipulated in applicable laws and regulations and the underlying ILO conventions (ILO Conventions number 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182) ○ Verification of K3 program activities and their implementation indicates compliance in the field. Regarding health checks, it was found that they were only part of standard routine examinations conducted by paramedics. Meanwhile, periodic employee health checks, in the form of medical check-ups (MCUs), had not been conducted on employees. ○ The company has provided a safe and healthy working environment and has taken effective measures to prevent accidents and injuries to workers' health by minimizing the potential causes of danger in the working environment. ○ The company has provided appropriate personal protective equipment for its work, conducted monthly K3L inspections including the use of PPE, to ensure and remind company employees and contractor workers and has conducted socialization, guidance and training on safe work practices for employees and contractor workers. ○ The Company has complied with applicable national laws and regulations or collective labor agreements regarding working hours and leave, in accordance with the company's commitments as stated in the Human Rights Policy, Company Regulations for the 2025-2027 period, and the Employment Agreement between the Company and Employees. ○ The wage policy is regulated in the Company Regulation (PP) document for 2025 – 2027 which is valid and applicable, namely that which has been ratified by the Head of the Manpower and Transmigration Service of North Maluku Province Number: 560/256/DTT-MU/IV/2025, where the Chapter on Wages is listed in CHAPTER VII (Wages, Payment Methods and Income Tax) Article 20 ○ There is a commitment to equal opportunity, non-discrimination, freedom from harassment in the workplace, and support for gender equality contained in the document COMMITMENT TO ANTI-DISCRIMINATION, COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF ILO CORE CONVENTIONS, and COMMITMENT TO ANTI-SEXUAL HARASSMENT AND VIOLENCE, which was signed by the President Director of PT. Kalpika Wanatama I on July 23, 2025. The Anti-Discrimination Commitment document includes a statement that: Upholds Equal Rights and Opportunities and Prohibits All Forms of Discrimination in the Company Environment ○ The company has SOPs related to employee performance and career levels and has ensured clear employee career levels based on routine annual assessments of employee performance in accordance with the procedures implemented. ○ Perusahaan memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari dengan melakukan identifikasi dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan hutan, yang telah dilengkapi dengan table risiko dan peluang yang berisi tentang Isu-isu terkait Pengelolaan Hutan Lestari, Penjabaran, Resiko/Peluang, tindakan mengatasi Resiko/Peluang serta target pengendalian. ○ Berdasarkan bukti audit, analisis dan kriteria audit, dapat disimpulkan PT KW 1 telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi: Sumberdaya hasil hutan kayu hutan tanaman; kawasan hutan yang penting secara ekologis; dan fungsi sosial dan budaya. ○ Perusahaan telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, yaitu RKUPH Periode tahun 2018-2027 yang disetujui berdasarkan keputusan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan rencana kerja tahunan (RKTPH) - o Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan (Perubahan RKUPH Periode 2018-2027), telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yaitu mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara (lampiran SK MenLHK Nomor SK.6601/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), dimana dalam areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I terdapat fungsi kawasan HPT (2.404 ha), HP (9.293 ha) dan HPK (83 ha). Dan kemudian dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan areal budidaya, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. - o Perusahaan telah membuat rencana pengelolaan (Perubahan RKUPH Periode 2018-2027) yang umum telah mencakup; unit pengelolaan saat ini, tujuan pengelolaan jangka panjang dan Rata-rata jatah tebang tahunan, termasuk tingkat pemanenan lestari - o Berdasarkan SK PBPH dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK oleh perusahaan yang mencakup pemanfaatan secara komersial - o Perusahaan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan resiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan dalam operasional pengelolaan hutan antara lain dengan meminimalkan pembangunan infrastruktur, persiapan lahan tanpa bakar, dan penandaan batas areal tebangan - o Perusahaan telah mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dalam rencana pengelolaan hutan, antara lain hasil penelitian ilmiah pada pengelolaan hutan tanaman yaitu terkait Pertumbuhan Bibit Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) Pada Media Tanah Top Soil Dengan Pemberian Pupuk Npk Dan Kompos Hasil-hasil R&D yang relevan diadopsi dalam dokumen prosedur dan instruksi kerja (SOP dan WI) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan - o Perusahaan telah menunjukan dokumen Ringkasan Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman Tahun 2025 yang tersedia dan dapat diakses oleh publik pada website https://sgmaluku.co.id - o Perusahaan telah melakukan identifikasi peraturan, memiliki akses terhadap peraturan, menentukan bagaimana peraturan berlaku bagi perusahaan pada seluruh bidang pekerjaan, serta telah mematuhi sistem verifikasi legalitas kayu sebagaimana peraturan yang berlaku. - o Secara umum perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi yang terkait dengan pengelolaan hutan - o Perusahaan telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya, yaitu Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: FP-PK-004, Revisi 02 tanggal 04 September 2023 - o Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Kalpika Wanatama Unit I tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya kepemilikan dan penguasaan lahan oleh masyarakat hukum adat dan tradisional. - o Perusahaan telah memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar dengan melaksanakan persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari para pemegang hak, termasuk membuat perjanjian/kesepakatan kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan dan pemberian nilai manfaat tanaman kehidupan yang telah disepakati bersama

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- Perusahaan telah berupaya menghormati hak-hak masyarakat adat/lokal dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi. - Perusahaan telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 23 Juli 2025 dan telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182) - Hasil verifikasi terhadap kegiatan program K3 dan realisasinya, menunjukkan adanya kesesuaian di lapangan,. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan ditemukan fakta bahwa pemeriksaan kesehatan baru pada pemeriksaan rutin standar yang dilakukan oleh tenaga paramedis. Sedangkan pemeriksaan kesehatan karyawan berupa medical chek up (MCU), pada karyawan secara periodik belum dilakukan. - Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja - Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri yang sesuai untuk pekerjaannya, melakukan inspeksi K3L setiap bulan termasuk dalam penggunaan APD, untuk memastikan dan mengingatkan kepada karyawan perusahaan dan pekerja kontraktor serta telah melakukan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan praktik kerja yang aman untuk karyawan dan pekerja kontraktor. - Perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan cuti, sesuai dengan komitmen perusahaan yang tertuang dalam Kebijakan HAM, Peraturan Perusahaan periode tahun 2025-2027, dan Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Karyawan - Kebijakan pengupahan diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2025 – 2027 yang sah dan berlaku yaitu yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/256/DTT-MU/IV/2025, dimana Bab tentang Pengupahan tercantum pada BAB VII (Pengupahan, Cara Pembayaran Dan Pajak Penghasilan) Pasal 20 - Terdapat komitmen kesempatan yang sama, non-diskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender yang termuat dalam dokumen KOMITMEN TERHADAP ANTI DISKRIMINASI, KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN KONVENSI INTI ILO, dan KOMITMEN TERHADAP ANTI PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. kalpika Wanatama I tanggal 23 Juli 2025. Pada dokumen Komitmen Anti Diskriminasi tercantum pernyataan bahwa: Menjunjung Tinggi Persamaan Hak Dan Kesempatan Serta Melarang Segala Bentuk Diskriminasi Di Lingkungan Perusahaan - Perusahaan memiliki SOP terkait dengan kinerja karyawan dan jenjang karir serta telah memastikan jenjang karir karyawan secara jelas berdasarkan penilaian rutin setiap tahun terhadap kinerja karyawan sesuai dengan prosedur yang diterapkan
3	6. Supporting / Penunjang	<i>Company has provided sufficient funding in accordance with operational needs for 2023 to 2024, has organizational structure in forest management with competent human resources and have built and/or maintained adequate infrastructure.</i> <i>The company has been improving its employees' competencies annually based on the Training Needs Analysis, through both internal and external training activities. Training completion in 2024 reached 100%, and in 2025, as of September 2025, reached 83%.</i> <i>The company has built effective and continuous communication and consultation with the community, through socialization of activities that are routinely carried out every year in the process of approval based on prior and informed consent (PADIATAPA) in the assisted/affected villages.</i>

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- The company has established a mechanism for resolving complaints/grievances and disputes, namely the Conflict Handling Procedure (SOP), Document Number: FP – PK – 002 Date of Issue January 2, 2021, The purpose of this SOP, namely the Conflict Management Work Procedure, is as follows: 1). Guide staff and managers in efforts to resolve land conflicts. 2). Guide staff and managers in documenting land conflict resolution processes. 3). Evaluate complaints and demands of the parties objectively and determine the possible causes of complaints and demands of the parties. - PT Kalika Wanatama Unit I has a Documentation System Work Procedure Document Number: FS-PK-012 dated August 1, 2023 Revision 0, in point 6.4 Document storage it is stated that "Records that are evidence of the implementation of sustainable forest management activities must be documented, maintained and stored for a certain period of time based on the needs and interests in the sustainable forest management system" - Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang cukup sesuai dengan kebutuhan operasional tahun 2023 s/d 2024, memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan hutan dengan SDM yang kompeten dan telah membangun dan/atau memelihara infrastruktur secara memadai. - Perusahaan telah melakukan peningkatan kompetensi karyawannya setiap tahun berdasarkan Training Need Analysis, melalui kegiatan training baik yang diselenggarakan secara internal training maupun eksternal training. Realisasi training tahun 2024 mencapai 100% dan realisasi tahun 2025 sampai dengan september 83% - Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, melalui sosialisasi kegiatan yang secara rutin setiap tahun dalam proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) di desa binaan/terdampak - Perusahaan telah menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan yaitu Prosedur (SOP) Penanganan Konflik, Nomor Dokumen : FP – PK - 002 Tanggal Terbit 02 Januari 2021, Tujuan SOP ini yaitu Prosedur Kerja Pengelolaan Konflik bertujuan sebagai berikut : 1). Memandu para staf dan manajer dalam upaya menyelesaikan konflik lahan. 2). Memandu para staf dan manajer dalam mendokumentasikan proses-proses penyelesaian konflik lahan. 3). Mengevaluasi keluhan dan tuntutan para pihak secara objektif dan menentukan kemungkinan penyebab timbulnya keluhan dan tuntutan para pihak. - PT Kalika Wanatama Unit I telah memiliki Prosedur Kerja Sistem Dokumentasi Nomor Dokumen: FS-PK-012 tanggal 1 Agustus 2023 Revisi 0, pada point 6.4 Penyimpanan dokumen disebutkan bahwa "Catatan-catatan yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari harus didokumentasikan, dirawat dan disimpan selama waktu tertentu berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya didalam sistem Pengelolaan hutan lestari"
4	7. Operational / Operasional	- The company has operational documents that aim to maintain or improve forests and their environmental services, as well as maintain or improve the economic, ecological, social and cultural value of forest resources. - The company has implemented the THPB silviculture system where all trees will be completely felled and replanted in the felled area according to the type of tree being cultivated, namely Red Jabon, White Jabon and Sengon. Where in the implementation of the THPB silviculture system that ensures balanced harvesting and planting. In the post-harvesting procedure stage, there is a handover area (HOA) activity which is the handover of land from harvesting to plantation. In the plantation operational procedure after the land handover activity, planting activities are immediately carried out, so that land productivity will be maintained with balanced harvesting and planting activities. - The company has encouraged positive climate practices in forest management activities, namely implementing all stages of the THPB silviculture system, and in the context of forest

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		management that directly contributes to reducing greenhouse gas emissions and efficient use of resources, identification of high carbon stocks, calculation of GHG emissions, identification of GHG emission sources, and GHG emission mitigation plans are carried out. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I did not experience any conversion of natural forest into plantation forests after 31 December 2010, where based on the results of the Forest Conversion analysis, land clearing activities occurred after the first cycle period, namely 1994-1999, covering an area of 6,625 ha. ○ Based on the results of the High Conservation Value study, the company area contains HCV 3, or rare or endangered ecosystems, namely the KPPN, KPSL, and River Rift, and there is no afforestation activity. Based on field observations, HCV 3, namely the KPPN, KPSL, and River Rift, remains intact and is being left in its natural state. ○ Based on the Land Cover Map Coverage of October 23, 2016 and Coverage dated February 27, 2021 in the RKUPH document for the 2018-2027 Period and Amendments to the RKUPH for the 2018-2027 Period, it shows that in the work area there is no highly degraded land where the area is not the result of poor forest management practices and areas that are not restored and not in the process of recovery, so there is no consideration for becoming a plantation forest. ○ The company has made efforts to maintain and improve the health and vitality of forest ecosystems by means of forest protection and social management, namely the rehabilitation of protected areas. In an effort to support natural processes and biological preventive measures to control plant pests and diseases, the <i>Turnera subulata</i> plant has been developed as a natural predator host for caterpillar pests. ○ The company has encouraged or maintained adequate genetic, species and structural diversity to improve the health and vitality of forests against adverse environmental factors and strengthen natural regulatory mechanisms through forest protection, namely HCV identification activities and conducting flora and fauna management through monitoring and monitoring activities of flora and fauna in the KPPN area, KPPS Km 5, Lagoy River Boundary, Su River Boundary and Gandoli River Boundary ○ PT Kalpika Wanatama Unit I has a policy that prohibits the use of fire in sustainable forest management, which is contained in the Land Clearing Without Burning Policy (PLTB) document dated July 23, 2025. Where in Sustainable forest management, there is a commitment to controlling forest and land fires by carrying out land clearing without burning in all stages of plantation forest development activities. ○ The company has a mechanism and has implemented steps to protect forests from fires, namely the SOP for Forest and Land Fire Control, SOP No. FP-PK-001 Revision 01 dated September 4, 2023, Dalkarhutla Organization, Dalkarhutla Human Resources, Dalkarhutla Infrastructure, Dalkarhutla Operations, Dalkarhutla Innovation Development, Community Empowerment and Partnership Cooperation (Community Involvement in Fire Care) and Reporting, Monitoring and Evaluation; ○ PT Kalpika Wanatama Unit I has obtained research results that explain that the local soil and climate conditions are suitable and suitable for Sengon plants to be developed as a staple crop. The evidence presented is in the form of a Journal of Sengon Growth Suitability Analysis (<i>Paraserianthes falcata</i>). The journal discusses Sengon's suitability to soil physical properties, Sengon's suitability to soil chemical properties, Sengon's suitability to rainfall, Sengon growth suitability analysis, environmental factors and soil fertility. ○ The company has used careful plant care, harvesting and transportation techniques to minimize soil damage during the pre-harvesting, harvesting and post-harvesting processes. ○ The company has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3), SOP Number: K3-PK-003 Revision 01 dated September 4, 2023, the SOP was approved by the Director. The procedure includes: B3 storage, diesel fuel storage,

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		gasoline and aviation fuel storage, pesticide and fertilizer storage and mixing, B3 transportation, emergencies, monitoring and evaluation, and K3 and environmental aspects. ○ The company has a procedure for Monitoring and Controlling HPT, and has developed an environmentally friendly biological action program for controlling pests and diseases in the process of developing <i>Turnera subulata</i> plants as natural predator hosts for caterpillar pests. ○ The company has documented pesticide use for both plantations and nurseries. Its use in nurseries and plantations adheres to established procedures, namely the Chemical Pesticide and Waste Management Procedure, SOP Number: RD-PK-005 dated August 1, 2023, approved by the Director. ○ Regarding pesticide use, the company has a policy prohibiting or limiting the use of pesticides, which is contained in the Active Chemical Substances Use Policy dated July 23, 2025, signed by the President Director. This policy document explains that PT Kalpika Wanatama does not store, use, or purchase active chemicals prohibited by the government, PEFC, FSC, SBP, the Stockholm Convention, and WHO. ○ The company has listed the types of pesticides categorized as prohibited based on the Minister of Agriculture Regulation No. 43 of 2019 concerning Pesticide Registration and the Stockholm Convention of 2001, which has been ratified by Law No. 19 of 2009 concerning Organic and Persistent Pollutants. A list of active ingredients and pesticide additives has been attached to the list. ○ In using pesticides, the company has applied them in the field according to the dosages regulated and listed on the product packaging, or according to recommendations from the RnD department. The following is an example of recommended herbicide use according to RnD recommendations for caterpillar pest control applications, based on the RnD Technical Recommendations for HPT Control in Plantations. ○ In an effort to improve plant growth, the company has fertilized Jabon plants with several types of fertilizer. Fertilization activities are carried out in two stages. The dosage and time period are determined based on soil class and plant type. The first stage (basic fertilizer) at the time of planting, the fertilizer used is basic fertilizer with a dose of 150 grams per plant and NPK fertilizer with a dose of 20 grams per stem. The second stage (advanced fertilizer) at the age of 2, 4, 11 and 26 months after planting, the fertilizer used is NPK (15-15-15) with a dose of 100-150 grams per stem. And Urea fertilizer after the plant is 36 months old with a dose of 150 grams per plant. ○ The company has determined the suitability of the types of plants being developed. The site-matching planting method is based on the suitability of the site for the types of plants being developed, namely Jabon and Sengon as the main crops. The basis for determining the THPB silviculture applied is to establish a stand of the same age using clear-cutting harvesting techniques. The company has not utilized non-timber forest products and environmental services. ○ Participating in the IFCC SFM certification is one of the company's efforts to increase the economic value of forest wood products sent to the PT Mangole Timber Producer Industry for marketing to the global market. Meanwhile, regarding market opportunities and economic activities related to environmental services, PT Kalpika Wanatama Unit I has not yet engaged in multi-forestry business (referring to the Amendment to the RKUPH for the 2018-2027 Period). ○ The company implements a silvicultural system that ensures balanced harvesting and planting. During the post-harvest stage of the harvesting process, a handover area (HOA) is performed, which is the transfer of land from the harvesting area to the plantation. Plantation operational procedures immediately begin after the land handover, ensuring land productivity through balanced harvesting and planting. ○ The company has ensured that the harvesting rate of timber forest products does not exceed the sustainable production level. Where with a 7-year cycle and an average stand increment for all types of Jabon plants is 24.6 m³/year, with an area of 885.71 ha/year and a volume

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		of 152,520 m³/year. Based on the 2024 RKTPH production realization data, it is 68,930.52 m³ with a harvested area of 569.02 ha. Thus, the timber harvesting activities carried out do not exceed the sustainable production level, in accordance with the felling quota set out in the planning document (RKUPH). ○ The company has a mechanism in place to optimize harvested forest products. There are three stages in timber harvesting: pre-harvesting, harvesting in progress, and post-harvesting. At the post-harvest stage, assessments are conducted using the following parameters: wood loss, wood residue, and stump height. ○ The company has a wood traceability system and has implemented it in the field to ensure that forest products harvested and transported within its forest areas come from certified forest areas referring to the Procedures and Work Instructions for tracking and tracing the production of wood forest products from plantation forests. ○ The company has built and maintained adequate infrastructure (access roads, main roads, branch roads, bridges, culverts) in accordance with the management plan to ensure efficient delivery of goods and services while reducing negative impacts on the environment. ○ The company has allocated part of its area for protected areas in an effort to maintain, conserve or increase biodiversity at the landscape, ecosystem and genetic levels, and has carried out flora and fauna management through monitoring and monitoring activities of flora and fauna in the KPPN, KPSL and River Boundary areas. ○ The company has protected, conserved or reserved forest areas identified as ecologically important forest areas, in accordance with the management plan, namely allocating protected areas, identifying ecologically important areas within its work area through HCV assessment activities and regular monitoring of conservation areas. ○ The company does not exploit protected, threatened, or endangered plant and animal species for commercial purposes. In its wood utilization activities, it uses the following types of tree species: White Jabon, Red Jabon, and Sengon, as well as several types of mixed forest that grow naturally in the plantation forest area: Merong, Kenanga, Ambarella, Sukun Hutan, Ketapang, Red Jabon, White Jabon, and Benuang. ○ The company has conducted flora and fauna monitoring in the first semester of 2025 in its area, and based on the results of the biodiversity monitoring, the types of flora and fauna, number of individuals, number of species, abundance of species, diversity of species and conservation status of the identified species were identified. Data on the results of the identification of animal species in 2025 are included in the Flora and Fauna Identification Report for the First Semester of 2025. And the company has carried out maintenance and repair of its habitat and monitored the success of its regeneration through rehabilitation plant maintenance activities. ○ To ensure the success of regeneration through planting, the company has a 2-hectare Permanent Nursery with a seedling production capacity of 1,350,000 BST/Year and a 0.53-hectare (non-permanent) Nursery, the seedling production method used is transplanting. Sources of jabon seeds are obtained from, among others, Plus Tree stands identified within the concession area spread from Km 3 to Km 8. ○ The company has presented a Scientific Research Journal article stating that the Jabon plant is native to the Maluku region. This is in accordance with the provided reference, namely the results of a scientific study published in the Warta Rimba Journal Volume 9 Number 2 June 2021, entitled Analysis of the Potential of Jabon Plantation Forests (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq). The article explains that Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) is a plant species endemic to Sulawesi and Maluku. ○ In an effort to encourage contributions to the improvement and restoration of ecological connectivity, PT Kalpika Wanatama Unit I has carried out rehabilitation planting activities in protected areas.

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Kalpika Wanatama Unit I has a written policy document prohibiting the use of genetically engineered plant species, as stated in the Commitment to Implementing Germplasm Conservation document dated July 23, 2025, signed by the President Director. The policy document explains in point 1: Prohibiting the use of genetically modified plant species. - In an effort to encourage horizontal and vertical structural diversity as well as species diversity such as mixed stands and to maintain or restore landscape diversity, PT Kalpika Wanatama Unit I has allocated several protected areas as stated in the long-term planning document, consisting of KPPN, KPSL and River Boundaries. In addition, PT Kalpika Wanatama Unit I has also carried out rehabilitation planting activities, on the Lagoy River and Falaoq River Boundaries. - There are no traditional management practices that create ecosystems that are environmentally, socially, and economically valuable. Meanwhile, community involvement in the management and utilization of areas that have environmental, social, and economic benefits is essential. - In an effort to maintain and enhance the biodiversity of its operational activities, the company has undertaken several initiatives, including allocating a portion of the area for protected areas as habitats for flora and fauna species, covering an area of 1,327 hectares (11.27% of the total concession area). The protected areas allocated include: 429 hectares of KPPN, 374 hectares of KPSL, and 524 hectares of river banks. - In an effort to minimize and mitigate the impact and damage to the ecosystem in infrastructure construction activities, especially to rare, sensitive or genetically protected ecosystems and considering the presence of threatened species or other key species, especially in their migration patterns, the company has allocated protected areas throughout its area, carried out marking and maintenance of protected area boundaries and carried out management of flora and fauna through monitoring and monitoring of Conservation Areas. - Based on the results of the verification of the report documents for the 2024 Conservation Area Management and Monitoring Activities, there was no population explosion (overpopulation) of a species that could affect forest regeneration and growth as well as biodiversity. - The company has identified the existence of dead trees that are still standing, have holes, and old clumps. Based on field observations in the plots that have been felled, there are dead trees that are still standing, have holes, and old clumps, for example in Plot TSB 2101, TSB 2121. Based on observations in the protected areas in KPPN and KPSL, there are also several dead trees that are still standing, and trees with holes. - The company has increased the protective function of forests for the community, such as the potential role of forests in water purification, climate regulation, carbon absorption, as well as other regulatory or supporting services of the ecosystem through rehabilitation, forest protection and controlled management operations. - The company has allocated several protected areas in accordance with the long-term planning document for the 2018-2027 RKUPH Amendment Period, and has conducted outreach or provided information and counseling to the surrounding community regarding the existence of protected areas. - In its management plans and operations, the company has maintained and enhanced areas that fulfill specific and recognized community protection functions. In the field, protected area boundaries have been marked with red crosses, and signs have been installed indicating the protected area and prohibiting hunting of protected animals. - PT Kalpika Wanatama Unit I in carrying out logging operations is carried out with the implementation of RIL Techniques. This is done to protect sensitive and erosion-prone land and areas as well as in areas where management activities can cause excessive soil erosion into the river flow. Actions taken include: conducting micro planning which includes activities to create logging block plans, create logging routes, create skid trail plans, create TPn plans,

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		mark critical areas, mark conservation area boundaries. Create drainage on transportation roads, create sediment traps, etc. - To minimize the impact and mitigation related to the construction activities of road infrastructure, bridges, base camps that have an impact on the opening of the land, prevent the entry of land into the river flow, and maintain the level and natural function of the flow and river body, the company has carried out rehabilitation planting around the base camp as mitigation of the opening of the land due to the construction of the base camp, the Lagoy River border, and the Falaoq River border. - The company has planted rehabilitative materials in several locations, including around the base camp to mitigate the impact of the base camp construction, along the Lagoy River, and the Falaoq River. Drainage along the transportation route and sediment traps have been installed to prevent soil material transported by rainwater runoff from entering the river. - Based on the 2021 Social Impact Assessment Report of PT Kalpika Wanatama Unit I and the 2021 High Conservation Value Identification Report, there are no forest areas used by the public as recreational areas. - Based on the 2021 Social Impact Assessment Report and the 2021 Identification of High Conservation Values, it was found that there were no sites recognized as historical, having cultural or spiritual value. - PT Kalpika Wanatama Unit I has strived to promote long-term health and well-being for the community and/or provide necessary public facilities. In 2024 and 2025, several forms of assistance will be provided to improve welfare and public facilities. - Based on the results of document verification, interviews with K3L personnel, and interviews with Waikoka Village government officials and Samuya Village community leaders, it was discovered that PT Kalpika Wanatama Unit I did not use local knowledge and experience for forest management purposes. - PT Kalpika Wanatama Unit I has a plan related to forestry-based local economic development, which is outlined in the RKUPH documents for 2018 – 2027, RKTPH 2023, RKTPH 2024, Operational Plan (RO) for 2024 and RO for 2025. - PT Kalpika Wanatama Unit I, which is part of the Sumber Graha Maluku (SGM) Group, has an organizational structure responsible for Research and Development activities consisting of Soil Research, Plant Pest & Disease (HPT) Research, Silviculture Research, and Tree Improvement Research. The research and development program of PT Kalpika Wanatama Unit I for the 2023-2025 period includes; Jabon Survival and Growth, HPT Monitoring, Plus Tree Selection, and Soil Survey. Perusahaan telah memiliki dokumen operasional yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta memelihara atau meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan Perusahaan telah menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan, yaitu Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon. Dimana dalam penerapan sistem silvikultur THPB yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Pada tahapan prosedur kegiatan pemanenan yaitu pada post harvesting terdapat kegiatan hand over area (HOA) merupakan serah terima lahan dari harvesting ke plantation. Dalam prosedur operasional plantation setelah kegiatan serah terima lahan segera dilakukan kegiatan penanaman, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. Perusahaan telah mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, yaitu menerapkan seluruh tahapan sistem silvikultur THPB, dan Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, dilakukan identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK. - PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010, dimana berdasarkan hasil analisis Konversi Hutan, kegiatan pembukaan lahan terjadi setelah periode daur pertama yaitu tahun 1994-1999 seluas 6.625 ha - Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, di areal perusahaan terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, yaitu KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan tidak ada kegiatan aforestasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, NKT 3 berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai, masih tetap utuh dan tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alaminya - Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan 23 Oktober 2016 dan Liputan tanggal 27 Februari 2021 dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027, menunjukan bahwa pada areal kerja tidak terdapat lahan sangat terdegradasi dimana kawasan tersebut bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan yang tidak terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan, sehingga tidak ada pertimbangan untuk menjadi hutan tanaman - Perusahaan telah berupaya melakukan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dengan cara perlindungan hutan dan kelola sosial, yaitu rehabilitasi kawasan lindung, Dalam upaya mendukung proses alami serta tindakan pencegahan secara biologis untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman dilakukan pengembangan tanaman <i>Turnera subulata</i> sebagai inang predator alami untuk hama ulat - Perusahaan telah mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami melalui perlindungan hutan, yaitu kegiatan identifikasi NKT dan melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN, KPPS Km 5, Sempadan Sungai Lagoy, Sempadan Sungai Su dan Sempadan Sungai Gandoli - PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) tanggal 23 Juli 2025. Dimana dalam pengelolaan hutan Lestari memiliki komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman - Perusahaan telah memiliki mekanisme dan telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan dari kebakaran, yaitu SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. FP-PK-001 Revisi 01 tanggal 04 September 2023, Organisasi Dalkarhutla, Sumberdaya Manusia Dalkarhutla, Sarana Prasarana Dalkarhutla, Operasional Dalkarhutla, Pengembangan Inovasi Dalkarhutla, Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan (Keterlibatan Masyarakat Peduli Api) dan Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi; - PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai hasil kajian yang menerangkan bahwa kondisi tanah dan iklim setempat memiliki kesesuaian dan cocok untuk tanaman Sengon dikembangkan sebagai tanaman pokok. Bukti yang disampaikan berupa Jurnal Analisis Kesesuaian Pertumbuhan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Dalam jurnal tersebut telah dibahas mengenai kesesuaian Sengon terhadap sidat fisik tanah, kesesuaian Sengon terhadap sifat Kimia Tanah, kesesuaian Sengon terhadap curah hujan, analisis kesesuaian pertumbuhan Sengon, faktor lingkungan dan kesuburan tanah - Perusahaan telah menggunakan teknik-teknik perawatan tanaman, pemanenan, dan pengangkutan yang teliti untuk meminimalkan kerusakan tanah pada proses pre harvesting, harvesting proses dan post harvesting

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- Perusahaan telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), SOP Nomor: K3-PK-003 Revisi 01 tanggal 4 September 2023, SOP disetujui oleh Direktur. Dalam prosedur tersebut telah mencakup: penyimpanan B3, penyimpanan bahan bakar solar, penyimpanan bahan bakar bensin dan avtur, penyimpanan dan pencampuran pestisida, pupuk, pengangkutan B3, keadaan darurat, monitoring dan evaluasi dan aspek K3 dan lingkungan - Perusahaan telah mempunyai prosedur Monitoring dan Pengendalian HPT, dan telah dikembangkan program tindakan biologis yang ramah lingkungan dalam penanggulangan hama dan penyakit dalam proses pengembangan tanaman <i>Turnera subulata</i> sebagai inang predator alami untuk hama ulat - Perusahaan telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation dan di persemaian. Dalam penggunaannya di persemaian dan di plantation telah mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya, SOP Nomor: RD-PK-005 tanggal 1 Agustus 2023 yang disahkan oleh Direktur - Dalam penggunaan pestisida, perusahaan telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Penggunaan Zat Kimia Aktif tanggal 23 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa PT Kalpika Wanatama tidak menyimpan, menggunakan dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh pemerintah, PEFC, FSC, SBP, Stockholm Convention, dan WHO. - Perusahaan telah menunjukan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida dan Konvensi Stockholm Tahun 2001 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 tentang Bahan Pencemar Organik dan Presisten. Telah dilampirkan daftar bahan aktif dan bahan tambahan pestisida pada daftar tersebut. - Dalam penggunaan pestisida, perusahaan telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Berikut contoh rekomendasi penggunaan herbisida sesuai rekomendasi RnD untuk aplikasi pengendalian hama ulat, berdasarkan Rekomendasi Teknis RnD Pengendalian HPT di Plantation - Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, perusahaan telah memberikan pupuk pada tanaman Jabon dengan beberapa jenis pupuk. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak dua tahapan. Dosis dan periode waktu ditentukan berdasarkan kelas tanah dan jenis tanaman. Tahap pertama (pupuk dasar) pada saat penanaman, pupuk yang digunakan adalah pupuk dasar dengan dosis sebanyak 150 gr per tanaman dan pupuk NPK dengan dosis 20 gr/btg. Tahap kedua (pupuk lanjutan) pada umur 2, 4, 11 dan 26 bulan setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah NPK (15-15-15) dengan dosis 100-150 gr/btg. Dan pupuk Urea setelah umur tanaman 36 bulan dengan dosis 150 gr per tanaman. - Perusahaan telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site matching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu Jabon dan Sengon sebagai tanaman pokok. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. Perusahaan belum melakukan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan - Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan yang dikirim ke Industri PT Mangole Timber Producer untuk pemasaran produk ke pasar global. Sementara untuk peluang pasar dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan jasa lingkungan PT Kalpika Wanatama Unit I belum melakukan multiusaha kehutanan (mengacu pada Perubahan RKUPH Periode tahun 2018-2027

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- Perusahaan menerapkan sistem silvikultur yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Pada tahapan prosedur kegiatan pemanenan yaitu pada post harvesting terdapat kegiatan hand over area (HOA) merupakan serah terima lahan dari harvesting ke plantation. Dalam prosedur operasional plantation setelah kegiatan serah terima lahan segera dilakukan kegiatan penanaman, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. - Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Dimana dengan Daur 7 tahun dan riap tegakan rata-rata untuk seluruh jenis tanaman Jabon adalah sebesar 24,6 m³/th, dengan etat luas 885,71 ha/thn dan etat volume 152,520 m³/thn. Berdasarkan data realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 adalah sebesar 68.930,52 m³ dengan areal panen seluas 569,02 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang dilakukan tidak melampaui tingkat produksi yang lestari, sesuai dengan jatah tebangan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan (RKUPH). - Perusahaan telah memiliki mekanisme untuk mengoptimalkan hasil hutan yang dipanen. Dimana terdapat 3 tahapan dalam pemanenan kayu yaitu Pre Harvesting, Harvesting In Progress dan Post harvesting. Pada pos harvesting ditetapkan dilakukan penilaian dengan parameter; Wood Loss, Wood Residue dan Stump Height - Perusahaan telah memiliki sistem ketelusuran kayu dan telah mengimplementasikan di lapangan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat mengacu pada Prosedur dan Instruksi Kerja pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman - Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur (acces road, main road, branch road, jembatan, gorong-gorong) yang memadai sesuai dengan rencana pengelolaan untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang efisien dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. - Perusahaan telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kawasan lindung dalam upaya kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetic, dan telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai - Perusahaan telah melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis, sesuai dengan rencana pengelolaan, yaitu mengalokasikan kawasan lindung, melakukan identifikasi areal yang penting secara ekologis di dalam areal kerjanya melalui kegiatan penilaian NKT dan pemantauan kawasan konservasi secara berkala - Perusahaan tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. Dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu Jabon Putih, Jabon Merah dan Sengon dan beberapa jenis rimba campuran yang tumbuh alami pada lokasi hutan tanaman, yaitu jenis tanaman; Merong, Kenanga, Kedondong, Sukun hutan, Ketapang, Jabon Merah, Jabon Putih dan Benuang - Perusahaan telah melakukan monitoring flora fauna pada periode semester I tahun 2025 di dalam arealnya, dan berdasarkan hasil monitoring keanekaragaman hayati tersebut teridentifikasi jenis-jenis flora dan fauna, jumlah individu, jumlah jenis, kelimpahan jenis, keanekaragaman jenis dan status konservasi jenis-jenis yang teridentifikasi. Data hasil identifikasi jenis-jenis satwa tahun 2025 termuat dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Semester I Tahun 2025. Dan perusahaan telah melakukan pemeliharaan dan memperbaiki habitatnya serta memantau keberhasilan regenerasinya melalui kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi. - Untuk menjamin keberhasilan regenerasi melalui penanaman, perusahaan telah memiliki Nursery Permanen seluas 2 ha dengan kapasitas produksi bibit sebanyak 1.350.000

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		BST/Tahun dan Nursery (non permanen) seluas 0,53 hektar, metode produksi bibit yang dilakukan yaitu transplanting. Sumber benih jabon diperoleh antara lain dari tegakan Pohon Plus yang teridentifikasi di dalam areal konsesi yang tersebar dari Km 3 s/d Km 8. - Perusahaan telah menunjukan artikel Jurnal Penelitian Ilmiah yang menyatakan bahwa jenis tanaman Jabon merupakan tanaman asli wilayah Maluku hal ini sesuai dengan referensi yang diberikan yaitu hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Warta Rimba Volume 9 Nomor 2 Juni 2021 yang berjudul Analisis Potensi Hutan Tanaman Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) merupakan jenis tanaman endemik di Sulawesi dan Maluku. - Dalam upaya mendorong kontribusi terhadap peningkatan dan pemulihan konektivitas ekologis tersebut, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung - PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam dokumen Komitmen Terhadap Pelaksanaan Konservasi Plasma Nutfah tanggal 23 Juli 2025, ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut dijelaskan pada point 1. Melarang penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari rekayasa genetika (<i>genetically modified organism</i>). - Dalam Upaya untuk mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang, terdiri dari KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Selain itu PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah melaksanakan kegiatan penanaman rehabilitasi, pada sempadan Sungai Lagoy dan Sempadan Sungai Falaoq - Tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga bagi lingkungan, sosial dan ekonomi. Sedangkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang memiliki nilai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi - Dalam upaya menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati dari kegiatan operasional, perusahaan telah melakukan beberapa upaya seperti alokasi sebagian areal untuk kawasan lindung sebagai habitat bagi spesies flora dan fauna seluas seluas 1.327 Ha (11,27% dari total areal konsesi). Kawasan lindung yang dialokasikan meliputi: KPPN seluas 429 Ha, KPSL seluas 374 Ha dan Sempadan Sungai seluas 524 Ha - Dalam Upaya untuk meminimalkan dan memitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, terutama terhadap ekosistem yang langka, sensitif, atau perlindungan genetik serta mempertimbangkan adanya spesies terancam atau spesies kunci lainnya khususnya pada pola migrasi mereka, perusahaan telah mengalokasikan kawasan lindung pada seluruh arealnya, laksanakan penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung dan melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan Areal Konservasi - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi tahun 2024 tidak ada ledakan populasi (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati - Perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon Pohon mati yang masih berdiri, berlubang, rumpun tua. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada petak-petak yang telah dilakukan penebangan terdapat adanya pohon mati yang masih berdiri, berlubang maupun rumpun tua, sebagai contoh di Petak TSB 2101, TSB 2121. Berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan lindung di KPPN dan KPSL terdapat juga beberapa pohon mati yang masih berdiri, dan pohon berlubang - Perusahaan telah melakukan peningkatan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem dengan cara rehabilitasi, perlindungan hutan dan operasional pengelolaan yang terkendali - Perusahaan telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027, dan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait adanya kawasan lindung - Dalam rencana dan operasional pengelolaannya, perusahaan telah memelihara dan meningkatkan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan yang spesifik dan diakui bagi masyarakat. Di lapangan keberadaan kawasan lindung telah ditandai batas-batasnya dengan cat silang warna merah dan telah dilakukan pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan berburu satwa-satwa dilindungi. - PT Kalpika Wanatama Unit I dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan kedalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan micro planning yang meliputi kegiatan pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase di jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen, dll. - Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, perusahaan telah melakukan penanaman rehabilitasi di sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat Pembangunan base camp, sempadan Sungai Lagoy, dan Sempadan Sungai Falaoq. - Perusahaan telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi, yaitu di sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat Pembangunan base camp, sempadan Sungai Lagoy, dan Sempadan Sungai Falaoq. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen trap untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (run off) masuk ke dalam sungai - Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Kalpika Wanatama Unit I tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021 tidak terdapat areal hutan yang digunakan oleh publik sebagai tempat rekreasi - Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual - PT Kalpika Wanatama Unit I telah berupaya untuk mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan. Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat beberapa bantuan untuk peningkatan kesejahteraan dan fasilitas publik - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan personil K3L, dan wawancara dengan Aparat pemerintahan Desa Waikoka, dan tokoh masyarakat Desa Samuya diketahui tidak terdapat pengetahuan dan pengalaman lokal yang digunakan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I untuk kepentingan pengelolaan hutan. - PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki rencana terkait pembangunan ekonomi lokal berbasis kehutanan, yang dituangkan dalam dokumen RKUPH Tahun 2018 – 2027, RKTPH 2023, RKTPH 2024, Rencana Operasional (RO) tahun 2024 dan RO Tahun 2025 - PT Kalpika Wanatama Unit I yang tergabung dalam Group Sumber Graha Maluku (SGM) memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari bagian Peneliti Soil, Peneliti Hama & Penyakit Tanaman (HPT), Peneliti Silvikultur dan bagian Peneliti Tree Improvement. Program kegiatan

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		penelitian dan pengembangan PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode tahun 2023-2025 antara lain terkait; Survival dan Pertumbuhan Jabon, Monitoring HPT, Seleksi Plus Tree dan Soil Survey.
5	8. Performance Evaluation / Evaluasi Kinerja	- The company has conducted regular monitoring and evaluation of forest resources and their management including ecological, social and economic impacts, the results of which must be fed back into the planning process. - In an effort to monitor forest health and vitality, PT Kalpika Wanatama Unit I has implemented mechanisms and procedures to protect the forest from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment and other non-procedural activities. - PT Kalpika Wanatama Unit I has regulated, monitored, and controlled Non-Timber Forest Products (NTFPs). This monitoring is outlined in the 2025 Non-Timber Forest Product Utilization Monitoring document (January–July). The document monitors the utilization of NTFPs by employees and the community, including water spinach. - The company has carried out monitoring of working conditions recorded in the P2K3 Report document every quarter, namely camp inspection activities, camp nursery inspections, PT BAP Contractor Mes inspections, and employee mess inspections at the base camp. - The company has conducted monitoring and evaluation of the implementation and effectiveness of the occupational health and safety management system which is recorded in the quarterly P2K3 Report document and the 2025 Health Safety Environment work program. - PT Kalpika Wanatama Unit I has conducted an Internal Audit in 2025. In the internal audit report, it is stated that this Internal Audit aims to monitor activities in the company so that they are in accordance with procedures and avoid inconsistencies in their implementation and address potential non-conformities as well as take preventive measures and take corrective actions in every incident or report of non-conformity. Internal audits/assessments are used as one of the materials for management evaluation and the preparation of PBPH operational activity plans as a whole or per part of the activities being assessed/audited. - The company has appointed a person in charge of implementing internal audits who was authorized by the Director based on Decree Number: 001/KW I/IX/2023 dated September 25, 2023. The implementation of the internal audit of the IFCC SFM scheme was carried out from September 1 to 4, 2025 by the Internal Audit Team with a letter of assignment from the President Director Number: 021/SK/Director/VIII/2025 dated August 4, 2025 - PT Kalpika Wanatama Unit I has conducted a management review, as outlined in the Management Review Results document. This Management Review Results document is based on the results of a meeting held at the Mangole main office on September 30, 2025, attended by: Director, Regional Head, Department Head, Unit Head and staff. - The Company has ensured that the Management Review includes outputs that include decisions related to opportunities for continuous improvement and changes required in the management system. - There is documented information that is stored as evidence of the results of the management review, namely in the form of a Management Review Results document signed by top management, namely the Director, on September 30, 2025. - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, yang hasilnya harus dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan - Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya. - PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengatur, memantau dan mengontrol Hasil Bukan Kayu. Pemantauan ini tertuang dalam dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu tahun 2025 (Januari – Juli). Pada dokumen terpantau pemanfaatan HHBK oleh karyawan dan masyarakat yaitu berupa sayuran kangkung. - Perusahaan telah melakukan Pemantauan kondisi kerja terekam pada dokumen Laporan P2K3 setiap triwulan, yaitu kegiatan Inspeksi camp, Inspeksi camp nursery, Inspeksi Mes Kontraktor PT BAP, dan Inspeksi mess karyawan di base camp - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terekam pada dokumen Laporan P2K3 setiap triwulan dan Program kerja Health Safety Environment tahun 2025 - PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan Audit Internal tahun 2025,. Dalam laporan audit internal disebutkan bahwa Audit Internal ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan di perusahaan agar dapat sesuai dengan prosedur dan terhindar dari ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan mengatasi potensi ketidaksesuaian serta melakukan tindakan pencegahan dan mengambil tindakan perbaikan dalam setiap kejadian maupun laporan ketidaksesuaian. Audit/penilaian internal digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi manajemen maupun penyusunan rencana kegiatan operasional PBPH secara keseluruhan maupun per bagian kegiatan yang dinilai/audit. - Perusahaan telah menetapkan penanggung jawab pelaksana internal audit yang disahkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Nomor: 001/KW I/IX/2023 tanggal 25 September 2023. Pelaksanaan internal audit skema SFM IFCC dilakukan tanggal 01 s/d 04 September 2025 oleh Tim Internal Audit yang dengan surat tugas dari Direktur Utama Nomor: 021/SK/Direktur/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 - PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan tinjauan manajemen, tertuang dalam dokumen Hasil Tinjauan Manajemen. Dokumen Hasil Tinjauan manajemen ini didasarkan pada Hasil rapat yang bertempat di main office Mangole pada tanggal 30 September 2025, dihadiri oleh: Direktur, Kepala Regional, Department Head, Kepala Unit dan staf - Perusahaan telah memastikan bahwa dalam Tinjauan manajemen telah tertuang luaran yang mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan - Terdapat informasi yang didokumentasikan yang disimpan sebagai bukti hasil tinjauan manajemen yaitu berupa dokumen Hasil Tinjauan Manajemen yang ditandatangani oleh manajemen puncak yaitu Direktur, pada tanggal 30 September 2025.
6	9. Improvements / Perbaikan	<i>Regarding the non-conformity of the IFCC internal audit results, the Company has taken action to correct, evaluate and take necessary action, as well as review the effectiveness of all corrective actions.</i> <i>The Company has demonstrated evidence of corrective action on IFCC Internal Audit non-conformance findings, and has been verified by the Auditor.</i> <i>The Company has maintained and documented information on a summary of non-conformities, follow-up actions, and corrective actions taken based on the results of internal audits in the form of a Report. Evidence information related to the essence of the non-conformities that occurred and the follow-up actions taken, as well as the results of each corrective action completed, has been documented by the Internal Audit team in the Internal Audit Report each year, which is reported to the President Director.</i> <i>In its management implementation, PT Kalpika Wanatama Unit I has undertaken continuous improvement measures to improve the suitability, adequacy, and effectiveness of the sustainable forest management system and its implementation. It has demonstrated a</i>

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause/Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>willingness to respond to improvements in internal and external audit results, conduct regular monitoring, and implement the results of management reviews.</i> - o Terhadap ketidaksesuaian hasil internal audit IFCC, Perusahaan telah mengambil tindakan untuk mengoreksi, mengevaluasi, dan mengambil tindakan seperlunya, serta meninjau efektivitas semua tindakan perbaikan - o Perusahaan telah menunjukkan bukti tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian Audit Internal IFCC, dan telah diverifikasi oleh Auditor - o Perusahaan telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary tentang ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil internal audit dalam bentuk Laporan. Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan yang telah diselesaikan, telah didokumentasikan oleh tim Internal Audit dalam Laporan Audit Internal setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur Utama. - o Dalam implementasi pengelolaannya, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya. Terbukti telah bereaksi untuk memperbaiki hasil-hasil audit internal dan eksternal, melakukan monitoring secara berkala serta melakukan dan melaksanakan hasil dari tinjauan manajemen.

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the 2nd Surveillance assessment at PT Kalpika Wanatama Unit I show that the IFCC PHL standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021 for plantation forest management, are in compliance, with a note on improvements to non-conformities according to the identified timetable:

1. Major category : -
2. 2 (two) minor categories; will be verified in the next audit
3. Observations: 7 (nine); will be verified in the next audit

Non-conformity records are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Hasil pelaksanaan penilaian Penilikan Ke-2 di PT Kalpika Wanatama Unit I menunjukan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major berjumlah -
2. Berkategori Minor berjumlah 2 (dua); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi berjumlah 7 (sembilan); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.